

FORCLIME DUKUNG PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT dalam Pengelolaan Hutan Lestari dan Konservasi Keanekaragaman hayati di Tanah Papua

ARTIKEL LAINNYA

BALAI DIKLAT LHK MAKASSAR

Tingkatkan Kapasitas Kelompok Tani Hutan

DIALOG DENGAN KELOMPOK TANI

Hutan Mattiro Deceng, Sulawesi Selatan

Editorial

Tahun 2022 adalah saatnya FORCLIME melakukan aksi nyata di tingkat kampung di Tanah Papua. Topik yang ditampilkan pada edisi bulan Januari 2022 ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, dan Balai Taman Nasional Wasur (TN Wasur) secara resmi telah menetapkan kampung-kampung dampingan yang akan didukung oleh FORCLIME termasuk satu kampung yang diusulkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua, dan mulai pada tahun 2022 ini FORCLIME akan fokus mendukung peningkatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk peningkatan kelas KTH. Maksud kegiatan pendampingan peningkatan kelas KTH Pemula ke kelas Madya dan kelas Utama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha, melalui fasilitator kampung bekerja sama dengan Penyuluh Kehutanan untuk mewujudkan KTH yang produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

Uraian secara lugas tentang kampung-kampung yang didukung oleh FORCLIME di Tanah Papua, yakni dimulai dari proses identifikasi pemilihan kampung dengan pendekatan yang partisipatif diketahui dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat provinsi oleh Dinas Kehutanan, Balai Besar KSDA, dan Balai Taman Nasional, sampai pada penggunaan pedoman KTH dan standar kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

FORCLIME bekerja sama dengan staf-staf Dinas Kehutanan Papua Barat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Besar KSDA Papua, dan Balai TN Wasur telah melakukan serangkaian kegiatan survei sosial ekonomi dan budaya di 20 kampung yang tersebar di wilayah kerja KPHP Unit IV

Tambrau dan KPHP Unit V Sorong Selatan, di kampung-kampung binaan Balai Besar KSDA di wilayah Cagar Alam Cycloop di Kabupaten Jayapura, dan di kampung-kampung yang berada di dalam zona tradisional TN Wasur di Kabupaten Merauke. Dari 20 kampung tersebut, ada delapan kampung yang dipilih untuk didukung oleh FORCLIME, yakni untuk Provinsi Papua terdiri atas Kampung Wasur di Distrik Merauke, Kampung Yanggandur di Distrik Sota, Kampung Tablasupa di Distrik Depapre, dan Kampung Doyo Baru di Distrik Waibu. Sedangkan, untuk Provinsi Papua Barat terdiri atas Kampung Bikar di Distrik Bikar, Kampung Emaus di Distrik Sausapor, Kampung Wendi di Distrik Sawiat, dan Kampung Haha di Distrik Saremuk. Selain itu, kampung yang diusulkan DKLH Papua adalah Kampung Babrongko, Distrik Ebungfaw Kabupaten Jayapura.

Tinjauan umum tentang data KTH di Tanah Papua menunjukkan bahwa lebih dari 200 KTH rata-rata memiliki tingkatan pemula.

Data tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan FORCLIME yang berfokus pada dukungan untuk peningkatan kapasitas KTH guna menyukseskan program-program pemberdayaan masyarakat dan membuka jalan bagi masuknya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Tanah Papua. Sebagai subjek, KTH dan Masyarakat Adat memainkan peran dalam pelaksanaan komitmen pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Terakhir, ulasan tentang dukungan FORCLIME kepada Balai Diklat LHK Makassar untuk pendampingan Kelompok Tani Hutan di sekitar Hutan Diklat Tabo-Tabo Sulawesi Selatan, dan Kelompok Tani Hutan Mattiro Deceng, Sulawesi Selatan. Semoga edisi ini dapat menjadi bentuk pemberitahuan di tahap awal, agar semua pihak dapat mengetahui tentang proses dan tujuan FORCLIME mendukung program kegiatan instansi mitra di tingkat kampung dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dampingan.

Mohammad Sidiq,

Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME Dukung Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lestari dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Tanah Papua

Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus (Otsus). Baik Papua maupun Papua Barat berkomitmen untuk mempertahankan minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui proses pembangunan yang menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah daerah memberi peranan besar kepada masyarakat adat. Pertama-tama masyarakat adat diyakini sebagai subjek dalam pengelolaan hutan lestari. Masyarakat adat secara perseorangan dan/atau kelompok memiliki kemampuan dan aturan adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, serta mampu melaksanakan upaya konservasi sumber daya alam. Karena itu, upaya memberdayakan masyarakat adat menjadi mutlak dipakai dalam memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan. Kedua, terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan memberdayakan masyarakat secara produktif, yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap produktivitas masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat adat merupakan hal yang sangat penting. Sehingga upaya-upaya memberdayakan masyarakat adat menjadi pilihan yang sangat tepat terutama karena besarnya kontribusi masyarakat adat pada upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi hijau, rehabilitasi dan restorasi. Selain itu, juga kontribusinya terhadap

pendidikan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat. Sejalan dengan hal itu, instansi mitra FORCLIME di daerah, seperti Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua, Balai Taman Nasional Wasur (TN Wasur), Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan DKLH Papua telah mendorong terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam program pemberdayaan masyarakat di Tanah Papua. Sampai dengan tahun 2022 ini, Dinas Kehutanan Papua Barat dan DKLH Papua melalui program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH), BBKSDA Papua, dan Balai TN Wasur telah melakukan kegiatan pendampingan KTH. Namun tentu saja keterbatasan sumber daya di lapangan menjadi salah satu faktor belum maksimalnya pendampingan di tingkat desa/kampung.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Bapak Ir. Runaweri, F.H., MM., kelompok tani hutan atau kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) di seluruh wilayah kerja KPH perlu diberikan peningkatan kapasitasnya dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan, dan mengelola usaha melalui bimbingan teknis, pelatihan, atau studi banding. Sehingga mereka dapat mendukung sistem pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Tanah Papua. Idealnya, KTH/MHA diberikan kesempatan untuk mengelola hak ulayat beserta sumberdaya alam yang dimiliki untuk kesejahteraannya melalui dukungan pemerintah dan mitra pembangunan. Usaha memberdayakan KTH/MHA tersebut dikelola melalui skema Perhutanan Sosial, Desa Binaan KPH, dan Kemitraan Konservasi.

2



Data KTH di Provinsi Papua dan Papua Barat

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa lebih dari 200 KTH rata-rata memiliki tingkatan pemula. Pada KTH Perhutanan Sosial, kelas pemula (*Blue*) dimana organisasi KTH baru terbentuk dan mendapatkan persetujuan menteri, tetapi belum ada Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Sedangkan KTH yang telah memiliki RKPS masuk kategori *Silver* (setara Madya).

Deskripsi data		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)				
		Jumlah	Kelas KTH			
			Pemula	Madya	Utama	Undefined
Papua	Merauke, Jayapura, Biak Numfor, Keerom, dan Supiori	16	3	12	1	
	KTH Perhutanan Sosial dan 2 SK Indikatif Hutan Adat (BPSKL)	55	55			
	Kelompok Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi (BBKSDA)	22	22			
	Kelompok Desa Binaan TN. Wasur	76	76			
Papua Barat	Fakfak, Manokwari, Raja Ampat, dan Kota Sorong	7	1	3	2	1
	KTH Perhutanan Sosial dan 1 SK Indikatif Hutan Adat (BPKSKL)	76	76			
	Kelompok Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi (BBKSDA)	25	25			

Sumber data: SIMLUH, 2021, diakses dari arthawisesa.com/simluhut/Portal/data/kth;2022; dan BBKSDA Papua dan Papua Barat, 2021

No	Kampung	Distrik	Kabupaten	Provinsi
1	Wasur	Merauke	Merauke	Papua
2	Yanggandur	Sota		
3	Tablasupa	Depapre	Jayapura	
4	Doyo Baru	Waibu		
5	Babrongko	Ebungfauw		
6	Bikar	Bikar	Tambrauw	Papua Barat
7	Emaus	Sausapor	Sorong Selatan	
8	Wendi	Sawiat		
9	Haha	Saremuk		



Pada tahun 2021, FORCLIME bersama Balai TN Wasur, BBKSDA Papua, KPHP Unit IV Tambrauw dan KPHP Unit V Sorong Selatan telah mengidentifikasi 20 kampung, yakni 10 kampung di Papua, dan 10 kampung di Papua Barat, dengan tujuan untuk memperoleh data terkait kondisi sosial-ekonomi-budaya dan potensi sumberdaya alam unggulan setempat dikaitkan dengan beberapa aspek, antara lain aspek geofisik, status pendampingan, kelembagaan, kepemilikan lahan, dan potensi HHBK, dan sistem pemasaran. Dari 20 kampung tersebut, ada delapan kampung yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Balai Besar KSDA, Kepala Balai TN Wasur, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dalam Risalah Penetapan Kampung.

Selain itu, DKLH Papua telah menetapkan satu kampung untuk didukung oleh FORCLIME di wilayah Kabupaten Jayapura.

FORCLIME bekerja untuk mendukung program kegiatan Balai Besar KSDA, Balai TN Wasur, Dinas Kehutanan Papua Barat dan DKLH Papua melalui UPTD KPH, Pokja Perhutanan Sosial, dan KTH; yakni mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan KTH dan pemanfaatan kawasan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk jasa lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi dan pengembangan pasar. Pada tahun 2022, mandat dukungan FORCLIME adalah bekerja sama di tingkat

kampung dalam bentuk kegiatan pendampingan peningkatan kelas KTH. Maksud kegiatan pendampingan peningkatan kelas KTH Pemula ke kelas Madya dan kelas Utama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan, dan usaha, dengan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kampung bekerja sama dengan Penyuluh Kehutanan untuk mewujudkan KTH yang produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

Pedoman yang digunakan untuk pendampingan peningkatan kelas KTH adalah PermenLHK RI Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan, dan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020 tentang Perubahan Sumber Daya Manusia Nomor P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan.

Kampung yang akan didukung oleh FORCLIME		Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)		
		Pemula	Madya	Utama
		Hasil penilaian <349	Hasil penilaian 350-700	Hasil penilaian >700
Papua	Kampung Wasur, Distrik Merauke Kampung Yanggandur, Distrik Sota Kampung Tablasupa, Distrik Depapre Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu Kampung Babrongko, Distrik Ebungfauw	Kelola Kelembagaan (360)	Kelola Kelembagaan (360)	Kelola Kelembagaan (360)
		Kelola Kawasan (200)	Kelola Kawasan (200)	Kelola Kawasan (200)
		Kelola Usaha (440)	Kelola Usaha (440)	Kelola Usaha (440)
Papua Barat	Kampung Bikar, Distrik Bikar Kampung Emaus, Distrik Sausapor Kampung Haha, Distrik Saremuk Kampung Wendi, Distrik Sawiat	Kelola Kelembagaan (360)	Kelola Kelembagaan (360)	Kelola Kelembagaan (360)
		Kelola Kawasan (200)	Kelola Kawasan (200)	Kelola Kawasan (200)
		Kelola Usaha (440)	Kelola Usaha (440)	Kelola Usaha (440)



Baseline survey kampung percontohan TN Wasur.

Pendampingan KTH di Wilayah TN Wasur

Di Provinsi Papua, lokus kegiatan pendampingan KTH berada pada zona tradisional TN Wasur yang akan dikembangkan untuk skema Kemitraan Konservasi. FORCLIME akan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan pihak TN Wasur melalui skema desa binaan dan memanfaatkan HHBK dan pengembangan jasa lingkungan. Kegiatan pemberdayaan oleh TN Wasur selama ini dilakukan pada empat sub suku Marind Anim, yaitu Marori Men-Gey, Kanume, Yeina dan Marind Imbuti. Lokasi kampung dukungan FORCLIME berada di wilayah suku Marori Men-Gey di kampung Wasur dan suku Kanume di Kampung Yanggandur. Dua sub-suku yang selama ini telah dibina yaitu Marori Men-Gey dan Kanum, keduanya memiliki hak adat dalam TN Wasur dan berada di kampung Wasur dan Yanggandur.

Kedua suku yang akan didukung FORCLIME tersebut sampai sekarang masih memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai ritual dan upacara adat dalam kampung. Mereka memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan sehari-hari, dan juga sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka juga masih memegang tradisi dan aturan adat yang berfungsi konservasi seperti *Sar*. Sebuah aturan adat yang mengatur larangan untuk mengambil sumber daya alam pada lokasi atau dusun, dalam jangka waktu mencapai 1000 hari hingga bisa 1-4 tahun untuk Suku Kanume. *Sar* berkaitan dengan penghormatan pada sanak saudara yang telah meninggal dunia. Upacara dilakukan setelah peringatan 40 hari kematian sanak keluarga yang meninggal tersebut. Selama *Sar* berlangsung aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hari-hari dapat dilakukan di dusun (hutan) lainnya yang masih terdapat sumber alam yang melimpah.

Di kampung Wasur terdapat satu kelompok budidaya anggrek. Sama halnya di Kampung Yanggandur, di Distrik Sota, kelompok Empi Wai Tetepu, beranggotakan 14 orang mulai memproduksi madu dan mengembangkan budidaya lebah madu *Trigona*. Selain itu ada juga kelompok sederhana yang memproduksi minyak kayu putih dan abon ikan gaster.



Diskusi bersama ketua KTH Bikar, Kampung Bikar.

Pendampingan KTH di Wilayah Penyangga CA Cycloop

Masyarakat Hukum Adat (MHA) baik yang di Merauke maupun di Jayapura memiliki kesamaan dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada alam dan seni budaya yang masih melekat pada alam sebagai sumber inspirasi utama. Sebut saja Cycloop yang memiliki banyak sekali nama dalam bahasa daerah tiap suku di daratan Tanah Tabi (sebutan wilayah adat untuk Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kerom dan Sarmi). Pegunungan Cycloops atau Robongholo memiliki sumber mata air yang menjadi sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Lebih dari itu Cycloop juga memiliki keterikatan dengan masyarakat yang mendiami pesisir Danau Sentani. Untuk itu, BBKSDA Provinsi Papua dalam mengelola fungsi kawasan melibatkan MHA sebagai mitra dalam menjaga dan melestarikan hutan sekitar Cagar Alam Cycloop.

Kampung Tablasupa telah menjadi salah satu kampung binaan BBKSDA sejak 2011. Kampung ini terdiri dari empat kelompok suku besar (Sorontow, Apaseray, Oyaitow, dan Nerokopow) berdasarkan asal wilayah yaitu Tepera (26 Marga). MHA kampung ini masuk dalam Suku Tepera, dalam Dewan Adat Suku (DAS) Tepera bersama dengan kampung Yepase, Wambena, Dormena, Yongsu, Yongsu Kecil, Ormu dan Ormu Kecil. BBKSDA saat ini mendampingi masyarakat di kampung Tablasupa untuk pengembangan jasa lingkungan yaitu sarana pengamatan burung Cenderawasih (*bird watching*), disamping membina kelompok pencinta alam dan kelompok perempuan mengembangkan HHBK seperti imitasi mahkota Burung Cenderawasih.

Tidak hanya di Tablasupa, BBKSDA juga berupaya menjaga kawasan dengan memberdayakan masyarakat yang berasal dari luar Jayapura untuk berhenti membuka kebun di dalam kawasan CA Cycloop, seperti di Kampung Doyo Baru. BBKSDA Papua memberikan pendampingan pola bercocok tanam untuk mengubah kebiasaan masyarakat melakukan perladangan berpindah. Selain itu, tim BBKSDA memperkenalkan sistem bedeng, yakni sistem persemaian dengan pemilihan bibit-bibit berkualitas.



Foto bersama saat survei rona awal kampung percontohan TN Wasur Papua.

Pendampingan KTH di Wilayah KPH/CDK

Di Provinsi Papua Barat, kampung-kampung yang akan didukung FORCLIME memiliki keunikan, dan keempat kampung itu berada di wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH), yaitu KTH Bikar, menghasilkan minyak lawang, di Kampung Bikar diketuai dan didominasi oleh kaum perempuan; KTH Emaus, penghasil minyak lawang di Kampung Emaus, memiliki anggota yang pekerja keras dan rajin meskipun terdapat anggota sudah lanjut usia; KTH Imian, penghasil gaharu; dan KTH Nagi, penghasil sagu di Kampung Haha. Meskipun mengelola dua komoditas yang berbeda, namun setiap anggota KTH Nagi dan KTH Imian bekerja bersama, semua berperan baik bapak-bapak maupun mama-mama, sangat aktif, dan terbuka. Sedangkan KTH Wendi di Kampung Wendi berbeda dengan KTH lainnya, mereka lebih fokus mengelola potensi ekowisata, yaitu sungai dan air terjun, dengan sarang semut sebagai komoditas HHBK unggulan.

Dalam wilayah kerja KPHP Unit IV Tambrau di Distrik Bikar dan Distrik Sausapor diperoleh informasi HHBK yang potensial seperti: Kemiri, minyak lawang, kelapa, nilam, gaharu, madu, rotan, anggrek, pisang dan lainnya. Disamping itu, terdapat juga potensi jasa lingkungan misalnya peninggalan sejarah perang dunia kedua berupa peralatan tempur. Sedangkan di wilayah KPHP Unit V Sorong Selatan pada Distrik Sawiat dan Distrik Saremuk, terdapat sarang semut, gaharu, rotan, udang lobster, udang kali, sagu, keladi, babi hutan, serta potensi ekowisata. Masyarakat mengelola HHBK secara berkelompok dengan pengelolaan dilakukan di hak ulayat masing-masing marga, serta terdapat hutan keramat yakni hutan yang hanya dapat diakses oleh marga pemilik hak ulayat tanah. Hutan ini tidak dapat dimanfaatkan potensi sumber daya alamnya atau dilarang untuk pemanfaatannya.

Kampung-kampung pada Distrik Bikar dan Distrik Sausapor, di wilayah KPHP Unit IV Tambrau didiami oleh Suku Abun dengan terdapat lembaga adat yang diakui yakni Lembaga Masyarakat Adat Suku Abun (LEMASA). Kampung-kampung di Distrik Saremuk dan Distrik Sawiat, di wilayah KPHP Unit V Sorong Selatan didiami oleh suku Tehit (Tehit Mlafle, Tehit Mlaklya, Tehit-Imyan, Tehit Sefah). Inisiatif pembangunan Hutan Adat merupakan salah satu arahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk selanjutnya didukung dalam kampung-kampung yang menjadi fokus utama pendampingan dan kegiatan FORCLIME.

Di sisi lain, di wilayah Papua, Kampung Babrongko Distrik Ebungfauw yang berada di dalam wilayah CDKLH Papua merupakan salah satu kampung yang berpotensi untuk dikembangkan ekowisata disamping produk-produk lokal seperti sagu, ikan, dan HHBK lainnya.

Sebagai bagian dari mandat kerja sama teknis, FORCLIME akan mendukung kegiatan pendampingan masyarakat di tingkat kampung, terutama dalam rangka pendampingan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Tanah Papua, melalui penguatan KTH untuk mengelola kelembagaan, kawasan, dan mengelola usaha, dengan menempatkan pendamping masyarakat di masing-masing kampung, dan mendorong partisipasi penyuluh swadaya masyarakat (*local champion*), dan LSM lokal yang diharapkan dapat meneruskan kegiatan pendampingan secara berkelanjutan.



Foto bersama saat indentifikasi kampung di wilayah KPHP Sorong Selatan

FORCLIME akan mendukung kegiatan pendampingan masyarakat di tingkat kampung, terutama dalam rangka pendampingan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Tanah Papua



Diskusi bersama masyarakat saat indentifikasi kampung di wilayah KPHP Sorong Selatan

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Melanesia Brigitte Boseran**, Advisor Junior bidang penghidupan (*livelihood*) pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan
2. **Rut M Ohoiwutun**, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
3. **Nita Yohana**, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
4. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Balai Diklat LHK Makassar Tingkatkan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Dampungan di Sekitar Hutan Diklat Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang berbagai hak dan kewajiban kelompok tani hutan (KTH) di sekitar Hutan Diklat Tabo-Tabo, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BDLHK Makassar) mengadakan lokakarya selama dua hari dari tanggal 16 – 17 November 2021 di desa Tabo-Tabo di Sulawesi Selatan. Kepala BDLHK Makassar membuka rapat pada Selasa pagi melalui daring. Lokakarya yang didukung FORCLIME ini melibatkan tiga kelompok petani hutan yaitu Deswita, Mattiro Deceng dan Mappaenre Dalle.

Kelompok tani hutan di kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan usaha kecil lokal yang bergerak di bidang produksi gula aren, madu dan jambu mete, serta pariwisata. Usaha kecil tersebut juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan penduduk setempat.

Peserta lokakarya mendapatkan pelatihan terkait dengan manajemen kelembagaan (yaitu akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kelompok), manajemen bisnis (termasuk pemasaran) dan manajemen mutu. Para peserta juga mendapatkan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar KTH, khususnya administrasi kelompok tani hutan dan penyusunan rencana kerja kelompok.

Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban KTH, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan proyek, serta berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
Daniel Maertz, Advisor bidang Pendidikan Orang Dewasa dan Pelatihan



Dialog dengan Kelompok Tani Hutan Mattiro Deceng, Sulawesi Selatan

“Selama pelatihan, saya belajar banyak tentang pengembangan kelompok tani dan pemasaran produk. Saya harap bisa lebih banyak praktik pada pelatihan mendatang”, kata Bapak Arifin, anggota KTH Mappaenre Dalle.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dampingan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Makassar mengadakan pertemuan informal pada 16 September 2021. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 peserta yang merupakan perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Matti-ro Deceng, tim Balai Diklat LHK Makassar, Penyuluh Kehutanan KPH Bulusaraung dan FORCLIME. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Seksi Sarana Evaluasi Diklat, Penyuluh Kehutanan dan Advisor FORCLIME tersebut, KTH Matti-ro Deceng mengemukakan bahwa pengolahan gula aren dan madu alam memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan bagi masyarakat. Meski demikian mereka menghadapi tantangan antara lain: (1) Produksi dan kualitas nira aren sangat dipengaruhi oleh iklim; (2) Pemanenan madu masih menggunakan pengasapan yang berisiko menimbulkan kebakaran hutan dan risiko kecelakaan karena harus memanjat pohon yang tinggi; (3) Pemasaran gula aren dan madu masih secara individu sehingga posisi tawar rendah dan harga fluktuatif.

Menghadapi situasi tersebut, KTH Matti-ro Deceng mengharapkan dukungan untuk pengembangan pemasaran madu dan aren, diversifikasi produk gula aren dan pengenalan pemanenan lebah secara lestari.

Kelompok Tani Hutan Matti-ro Deceng berdomisili di Kampung Panggalungan, Desa Tabo-tabo, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kampung ini adalah salah satu kampung yang ada di sekitar Hutan Diklat Tabo-tabo. Kelompok ini dibentuk oleh penyuluh Kehutanan BD LHK Makassar pada tahun 2014. KTH Matti-ro Deceng, beranggotakan 30 orang, mengembangkan usaha di bidang pengolahan gula aren dan pemanenan madu alam Apis dorsata yang diambil dari kawasan Hutan Diklat Tabo-tabo.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, KTH Matti-ro Deceng akan mengadakan pertemuan rutin mendiskusikan solusi-solusi untuk mengatasi tantangan tersebut di atas.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
Daniel Maertz, Advisor bidang pendidikan orang dewasa dan pelatihan



FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de